

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan salah satu isu struktural paling mendasar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.001 pulau dan 34 provinsi (BPS, 2023), disparitas spasial di Indonesia bukan sekadar persoalan statistik. Disparitas tersebut mencerminkan ketidakadilan distribusi sumber daya, kapasitas kelembagaan, dan akses terhadap peluang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2016–2019 relatif stabil, yaitu sekitar 5,02% hingga 5,17% per tahun. Namun demikian, kinerja makro ekonomi tersebut tidak serta-merta menjamin pemerataan manfaat pembangunan ke seluruh wilayah (BPS, 2023). Kontribusi Pulau Jawa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tercatat sebesar 58,49 % pada tahun 2016 dan secara konsisten bertahan pada kisaran 56,48 % hingga 57,27 % dalam kurun waktu 2022–2023. Sementara itu, kawasan Indonesia bagian timur yang meliputi Pulau Maluku dan Papua hanya menyumbang sekitar 2,46 % pada tahun 2016 dan 2,58 % pada tahun 2023, serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara berkontribusi sebesar 2,77 % pada periode yang sama. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan spasial yang signifikan, meskipun kawasan timur Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar {Formatting Citation}. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme redistribusi yang ada belum mampu mengimbangi kekuatan sentripetal yang menarik sumber daya ke pusat-pusat pertumbuhan.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Ketimpangan Regional yang dikembangkan oleh Albert O. Hirschman dalam karyanya *The Strategy of Economic Development* (1958). Hirschman mengajukan dua konsep utama dalam pembangunan antarwilayah, yaitu polarization effect dan trickle-down effect. Polarization effect adalah proses di mana wilayah inti menarik modal, tenaga kerja terampil, dan inovasi dari wilayah pinggiran. Akibatnya, ketimpangan antarwilayah semakin meningkat. Sebaliknya, trickle-down effect menjelaskan bahwa kemakmuran dari wilayah inti dapat menyebar ke wilayah lain. Penyebaran terjadi melalui permintaan antar daerah, transfer fiskal, dan migrasi tenaga kerja (Hirschman, 1958) sendiri mengakui bahwa dalam jangka pendek hingga menengah, efek polarisasi hampir selalu mendominasi efek penyebaran, terutama di negara-negara yang sedang dalam tahap awal industrialisasi. Relevansi kerangka ini terhadap Indonesia sangat kuat, mengingat dinamika pembangunan nasional masih ditandai oleh konsentrasi kegiatan ekonomi di beberapa klaster metropolitan yang terhubung erat dengan rantai nilai global (Suparman & Muzakir, 2023).

Salah satu pilar utama yang menentukan kapasitas suatu wilayah untuk tumbuh secara inklusif adalah akumulasi modal manusia. Dalam perspektif Hirschman, keunggulan wilayah inti tidak semata-mata bersifat fisik, tetapi juga bersumber dari konsentrasi tenaga kerja terdidik dan terampil yang menciptakan eksternalitas positif atau *agglomeration economies* yang memperkuat daya tarik investasi lebih lanjut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2025 terdapat kesenjangan yang signifikan dalam capaian rata-rata lama sekolah (RLS) antarprovinsi di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta mencatatkan RLS tertinggi secara nasional, yakni sebesar 11,31 tahun, sedangkan Provinsi Papua berada

pada posisi terendah dengan RLS sebesar 6,87 tahun. Selisih RLS sebesar 4,44 tahun menunjukkan adanya ketimpangan dalam kualitas sumber daya manusia antarwilayah di Indonesia. (BPS, 2025). Lebih dari sekadar akses ke pendidikan formal, modal manusia juga mencakup dimensi kesehatan, gizi, dan kemampuan adaptif terhadap perubahan teknologi (Bethania et al., 2024). menemukan bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia di wilayah luar Jawa secara statistik signifikan berkorelasi dengan penurunan indeks Williamson sebagai ukuran ketimpangan regional, meskipun efek tersebut bersifat lambat dan memerlukan waktu lebih dari satu dekade untuk menjadi substansial. Dengan demikian, kesenjangan modal manusia bukan sekadar akibat dari ketimpangan, melainkan juga menjadi sebab yang mereproduksi dan memperdalam ketimpangan itu sendiri secara kumulatif (Hajiali & Rifai, 2022)

Dimensi kedua yang tak terpisahkan dari analisis ketimpangan regional adalah akumulasi kapital domestik, baik dalam bentuk investasi swasta maupun belanja modal publik. Teori Hirschman menegaskan bahwa keputusan investasi bersifat sangat *path-dependent* artinya, wilayah yang sudah memiliki basis industri, infrastruktur, dan pasar yang dalam akan terus menjadi magnet bagi arus modal baru, sementara wilayah tertinggal menghadapi perangkap keseimbangan rendah (*low-equilibrium trap*). Berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dipublikasikan oleh Kementerian Investasi / BKPM, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Pulau Jawa pada periode awal 2016–2022 yaitu 52,4% dari total investasi nasional. Kondisi ini terjadi bukan semata-mata karena keunggulan komparatif alamiah Jawa, melainkan juga akibat ketidakmerataan infrastruktur pendukung investasi seperti jalan, pelabuhan, energi listrik, dan layanan logistik yang hingga

tahun 2023 masih jauh lebih lengkap dan andal di Jawa dibandingkan wilayah lainnya (Widodo, 2023). Penelitian (Yunitasari et al., 2023) memperkuat argumen ini dengan menemukan bahwa konektivitas infrastruktur transportasi merupakan prediktor terkuat konvergensi investasi antar provinsi di Indonesia, menggarisbawahi pentingnya investasi publik sebagai instrumen koreksi atas polarisasi kapital yang ditimbulkan oleh mekanisme pasar yang tidak sempurna.

Tekanan demografi merupakan dimensi ketiga yang membentuk pola ketimpangan wilayah secara signifikan, namun seringkali kurang mendapat perhatian memadai dalam analisis kebijakan. Indonesia memperlihatkan paradoks demografis yang bersifat asimetris dan terukur: seluruh provinsi di Pulau Jawa mencatatkan tingkat kepadatan penduduk di atas 858 jiwa per kilometer persegi, dengan DKI Jakarta sebagai titik ekstrem tertinggi yang mencapai 15.978 jiwa per kilometer persegi berdasarkan data BPS tahun 2022. Kondisi ini mencerminkan tekanan pengangguran struktural dan beban layanan publik yang berat. Sebaliknya, wilayah Papua hanya dihuni oleh sekitar 14 jiwa per kilometer persegi dan Kalimantan Utara hanya 9 jiwa per kilometer persegi pada periode yang sama. Ketimpangan distribusi penduduk yang sedemikian ekstrem ini menyebabkan wilayah Papua dan Kalimantan justru menghadapi kelangkaan tenaga kerja terampil untuk mengolah sumber daya alam mereka secara produktif (BPS, 2022). Dalam perspektif Hirschman, migrasi tenaga kerja dari wilayah pinggiran ke wilayah inti merupakan salah satu mekanisme *utama polarization effect* perpindahan individu muda, terdidik, dan produktif tidak hanya mengurangi pasokan sumber daya manusia di wilayah asal, tetapi juga memperlemah basis pajak lokal dan kapasitas permintaan agregat daerah tersebut (Mardhiah et al., 2023) mendokumentasikan bahwa pola migrasi internal Indonesia selama dua

dekade terakhir secara konsisten mempererat konsentrasi populasi produktif di kawasan Jabodetabek dan beberapa kota besar di Jawa, alih-alih menyebar ke wilayah-wilayah yang justru membutuhkan tenaga kerja. Ketidakseimbangan distribusi demografis ini, apabila tidak dikelola melalui kebijakan yang tepat, berpotensi menjadi penguat struktural ketimpangan jangka panjang, bukan sekadar dampak yang bersifat sementara.

Pemerintah Indonesia telah merespon persoalan ketimpangan antarwilayah melalui serangkaian kebijakan redistribusi dan desentralisasi fiskal, namun efektivitas kebijakan tersebut masih terbatas. Instrumen utama yang digunakan adalah Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan total alokasi yang berfluktuasi sepanjang periode penelitian, dari sebesar Rp776,3 triliun pada tahun 2016 hingga mencapai Rp814,72 triliun pada tahun 2023., (BPS, 2023a). Selain itu, pemerintah juga menginisiasi pembangunan infrastruktur strategis di luar Jawa melalui program Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk Jalan Tol Trans-Sumatera, Trans-Kalimantan, dan berbagai proyek di kawasan timur Indonesia. Namun demikian, (Yusuf, 2022) menemukan bahwa dampak dana desa terhadap konvergensi antarwilayah masih terbatas, terutama karena lemahnya kapasitas absorpsi fiskal di daerah tertinggal akibat rendahnya kualitas aparatur pemerintah daerah dan keterbatasan akses terhadap pembiayaan komplementer. Dalam kerangka Hirschman, permasalahan ini berkaitan dengan urutan intervensi pembangunan infrastruktur fisik akan menghasilkan dampak maksimal hanya apabila dibarengi secara simultan dengan investasi pada modal manusia dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal. Tanpa sinergi antara ketiga komponen tersebut, transfer fiskal cenderung hanya menghasilkan konsumsi jangka pendek

tanpa memicu akumulasi kapital yang berkelanjutan di wilayah tertinggal (Bappenas, 2024).

Berdasarkan pemaparan di atas, menjadi jelas bahwa dinamika ketimpangan wilayah di Indonesia selama periode 2016–2023 bersifat multidimensional dan tidak dapat dijelaskan melalui satu variabel tunggal. Interaksi kompleks antara defisit modal manusia, polarisasi akumulasi kapital, dan ketidakseimbangan tekanan demografi menciptakan suatu kondisi yang dalam kerangka Hirschman dapat dipahami sebagai polarisasi keseimbangan yang persisten, yaitu situasi di mana kekuatan sentripetal pembangunan secara terus-menerus mengalahkan kekuatan sentrifugal yang diharapkan dapat menyebarkan kemakmuran secara lebih merata.

Indeks Williamson merupakan salah satu indeks yang digunakan untuk menganalisa tentang ketimpangan wilayah karena Indeks Williamson dapat menggambarkan ketimpangan yang terjadi antar daerah. Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar (Sondakh et al., 2023). Indeks Williamson berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai tingkat ketidakmerataan pembangunan antar wilayah, terutama dalam membandingkan kondisi ekonomi kabupaten/kota dengan rata-rata kondisi ekonomi di tingkat provinsi. Semakin tinggi nilai Indeks Williamson yang dihasilkan untuk suatu wilayah, semakin besar pula disparitas atau jurang pembangunan ekonomi antar daerah di wilayah tersebut. Semakin besar nilai Indeks Williamson yang diperoleh, semakin besar pula tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah yang terjadi. Nilai indeks yang semakin rendah menunjukkan bahwa distribusi pembangunan ekonomi antar wilayah cenderung lebih merata. Indeks

Williamson sering digunakan dalam berbagai penelitian ekonomi wilayah untuk menganalisis perbedaan tingkat pembangunan antar daerah.

Indeks Williamson digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dinamika ketimpangan antar wilayah di Indonesia selama periode penelitian . Analisis ini selanjutnya dihubungkan dengan beberapa faktor yang kemungkinan mempengaruhi ketimpangan antar daerah, yaitu modal manusia, akumulasi kapital domestik, serta tekanan demografi. Ketiga faktor tersebut dianggap memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah. Perbedaan kualitas tenaga kerja, cara pembagian investasi dalam negeri, serta situasi jumlah penduduk di tiap provinsi bisa memengaruhi perubahan ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia (Azim, 2022). Kategorisasi nilai Indeks Williamson dibagi ke dalam beberapa rentang berdasarkan tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah. Nilai antara 0,00 hingga 0,30 mengindikasikan ketimpangan rendah, yang mencerminkan distribusi pendapatan per kapita antarwilayah yang mendekati dengan disparitas minimal. Nilai antara 0,30 hingga 0,50 menunjukkan ketimpangan sedang, yang mencerminkan adanya perbedaan tingkat pembangunan antarwilayah yang bersifat moderat dan masih dalam batas toleransi struktural pembangunan. Adapun nilai di atas 0,50 yang secara teoritis dapat melampaui angka 1,00 dalam kondisi ekstrem menunjukkan ketimpangan tinggi hingga sangat tinggi, di mana terdapat kesenjangan struktural yang substansial antara wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal (Kota et al., 2022)

Gambar 1. 1 Perkembangan Indeks Williamson pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2023



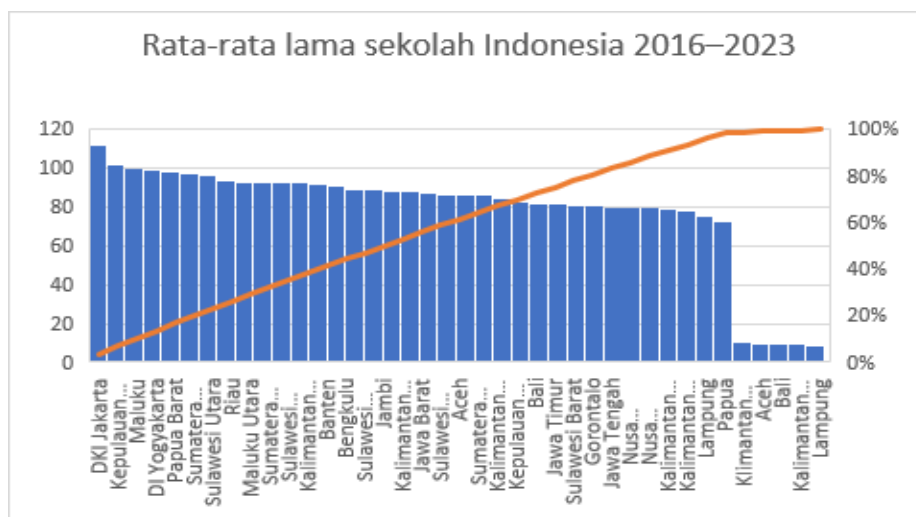
Sumber : Data Badan pusat statistik , 2026 diolah

Pada Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia yang diukur menggunakan Indeks Williamson pada periode tahun 2016–2023. Dari grafik diatas terlihat bahwa tingkat ketimpangan antar daerah di Indonesia selama masa penelitian mengalami perubahan naik turun. Indeks Williamson ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan per kapita antar wilayah berfluktuasi antara 0,70 dan 0,80 sepanjang tahun 2016 hingga 2023 tanpa menunjukkan tren konvergensi yang berarti. Nilai indeks yang konsisten berada di atas 0,70 mengindikasikan bahwa ketimpangan antar provinsi di Indonesia bukan hanya tinggi, melainkan juga bersifat struktural dan sulit untuk direduksi melalui pertumbuhan ekonomi agregat semata. Jika dilihat dari gambar di atas, perkembangan nilai Indeks Williamson selama periode 2016–2023 menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia masih tergolong tinggi dan cenderung mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Dalam proses

pembangunan nasional, masih terdapat tantangan dalam pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Perbedaan pembangunan di antara daerah dapat menyebabkan perbedaan tingkat kebahagiaan masyarakat dan ketidakseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia. hal ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan proses pertumbuhan ekonomi yang ada (Syaifudin et al., 2024).

Kerangka analitis yang paling tepat untuk membedah fenomena ini adalah Teori Ketimpangan Regional yang dirumuskan oleh Albert O. Hirschman dalam karyanya *The Strategy of Economic Development* (1958). Hirschman berargumen bahwa pembangunan ekonomi tidak pernah berlangsung secara serentak di semua wilayah, melainkan selalu dimulai dari satu atau beberapa titik yang kemudian ia sebut sebagai wilayah inti (*core regions*). Dua kekuatan berlawanan kemudian bekerja secara simultan: pertama, *polarization effect* yang menarik modal, tenaga kerja terampil, dan inovasi menuju wilayah inti sehingga memperlebar kesenjangan dengan wilayah pinggiran (*periphery*); dan kedua, *trickling-down effect* yang seharusnya menyebarkan kemakmuran dari wilayah inti ke wilayah sekitarnya melalui permintaan antardaerah dan migrasi balik. Hirschman (1958) sendiri menegaskan bahwa dalam konteks negara berkembang, efek polarisasi hampir selalu lebih kuat dalam jangka pendek, sehingga ketimpangan cenderung membesar sebelum akhirnya mengecil sebuah tesis yang sangat relevan untuk menjelaskan persistensi ketimpangan di Indonesia yang tercermin dalam Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1. 2 Rata-rata lama sekolah Indonesia 2016–2023



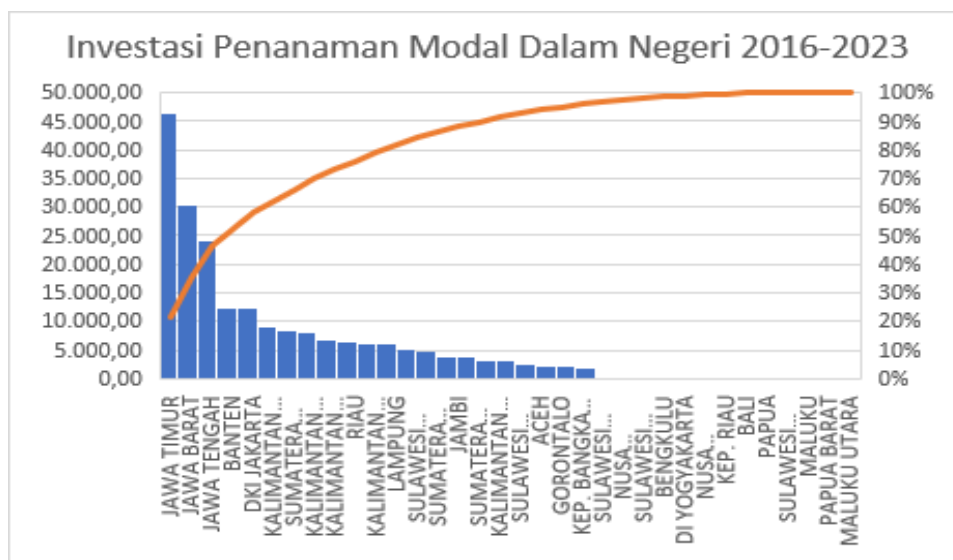
Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)

Gambar 1.2 menyajikan data rata-rata lama sekolah (RLS) di 34 provinsi Indonesia selama periode 2016–2023 yang memperlihatkan disparitas yang sangat mencolok. DKI Jakarta berada di posisi teratas dengan RLS sekitar 11 tahun, sementara provinsi-provinsi di kawasan timur seperti Papua, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat berada di kelompok terbawah dengan RLS jauh di bawah rata-rata nasional. Kurva kumulatif pada grafik tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar akumulasi modal manusia berkualitas tinggi berkonsentrasi hanya pada segelintir provinsi, mencerminkan distribusi yang sangat tidak merata. Dalam perspektif Hirschman, kondisi ini menciptakan *agglomeration economies* di wilayah inti yaitu keuntungan skala yang diperoleh dari konsentrasi tenaga kerja terdidik yang secara kumulatif memperlemah daya saing wilayah tertinggal (Haji Ali & Rifai, 2022). (Wahyuni, 2024) mengkonfirmasi bahwa kesenjangan modal manusia antar provinsi di Indonesia secara statistik signifikan berkorelasi dengan pelebaran indeks ketimpangan regional, dan perbaikannya memerlukan waktu yang panjang karena bersifat akumulatif.

Rata-rata lama sekolah adalah salah satu indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pelayanan yang adil dan merata bagi masyarakat (Upaya et al., 2024). Sumber daya manusia dalam bidang pendidikan sangat penting, karena dibutuhkan tenaga manusia yang sesuai kuantitas dan memiliki kualitas yang baik dalam dunia pendidikan agar tujuan pembangunan pendidikan dapat tercapai. Sistem pendidikan nasional dijalankan secara bertahap oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan daerah dan bidang pendidikan (Ningsih et al., 2022)

Banyak negara industri maupun negara berkembang telah lama memperdebatkan hubungan antara pendidikan dan kondisi kesejahteraan masyarakat. Berbagai pandangan menyatakan bahwa Peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas dapat berkontribusi dalam mengurangi berbagai permasalahan sosial ekonomi, termasuk kemiskinan. Pendidikan yang lebih tinggi biasanya membantu seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan gaji yang lebih sesuai, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Yansyah et al., 2024) Pendidikan merupakan bagian penting dari modal manusia (*human capital*) yang berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Perbedaan dalam kualitas pendidikan di berbagai daerah bisa membuat perbedaan dalam kualitas manusia, yang pada akhirnya bisa menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan di setiap wilayah. Riset tentang ketimpangan regional di Indonesia menunjukkan bahwa modal manusia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan, selain faktor akumulasi modal domestik melalui investasi serta kondisi demografi yang berbeda di setiap wilayah.

Gambar 1. 3 Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) 34 Provinsi di Indonesia 2016-2023



Sumber: Kementerian Investasi/BKPM (2024)

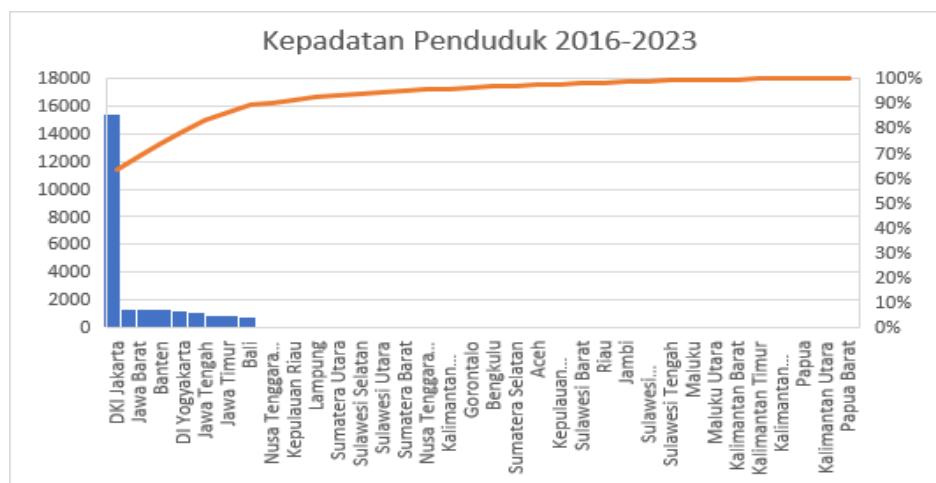
Berdasarkan visualisasi pada Gambar 1.3 menunjukkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di 34 provinsi selama 2016–2023 yang memperlihatkan konsentrasi investasi yang sangat ekstrem. Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah mendominasi tiga posisi teratas dengan nilai investasi yang jauh melampaui provinsi-provinsi lainnya, sementara Maluku Utara, Papua Barat, dan beberapa provinsi luar Jawa lainnya hampir tidak mendapat aliran investasi yang berarti. Kurva kumulatif yang sangat curam pada grafik ini mengindikasikan bahwa sekitar 60–70 persen total PMDN nasional terserap hanya oleh segelintir provinsi berbasis Jawa. Hal ini sepenuhnya konsisten dengan mekanisme *path-dependency* dalam teori Hirschman: wilayah yang sudah memiliki infrastruktur memadai, pasar yang dalam, dan ekosistem industri yang matang

akan secara natural lebih menarik bagi investor dibandingkan wilayah yang masih dalam tahap pembangunan awal (Manajemen et al., 2025). Sejalan dengan hal tersebut, (Praja, 2024) menemukan bahwa konektivitas infrastruktur merupakan faktor penentu utama konvergensi investasi antarwilayah di Indonesia, dan ketiadaannya berpotensi menciptakan jebakan struktural yang sulit diatasi hanya melalui mekanisme pasar semata.

Dalam konteks pembangunan wilayah, akumulasi modal domestik melalui investasi sangatlah penting. Investasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan kapasitas produksi, membangun sarana prasarana, serta membuka lapangan kerja. Daerah yang berhasil menarik investasi lebih besar umumnya mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan daerah yang mempunyai keterbatasan modal (Arnan et al., 2024).

Selain investasi, faktor kependudukan atau tekanan demografi juga berpengaruh terhadap dinamika buruk. Jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi membutuhkan tersedianya lebih banyak lapangan kerja, infrastruktur, dan layanan publik. Jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan investasi dan kesempatan kerja yang cukup, hal ini dapat memicu masalah sosial-ekonomi serta melemahnya antarwilayah (Diaz et al., 2016).

Dengan demikian, ketidakmerataan distribusi investasi domestik dan perbedaan kondisi kependudukan antar provinsi turut mempengaruhi dinamika kesenjangan wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis gambaran dari sisi investasi sebagai akumulasi modal, tetapi juga menganalisis aspek modal manusia serta tekanan demografi yang berbeda di setiap wilayah Indonesia pada periode 2016–2023.

Gambar 1. 4 Kepadatan penduduk 2016-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Gambar 1.4 menampilkan data kepadatan penduduk 34 provinsi periode 2016–2023 yang memperlihatkan DKI Jakarta dengan kepadatan sekitar 15.000–16.000 jiwa per kilometer persegi, disusul Jawa Barat dan Banten, sementara provinsi-provinsi di Kalimantan, Papua, dan Maluku berada di posisi paling bawah dengan kepadatan yang sangat rendah. Paradoks demografis ini sangat signifikan dalam konteks teori Hirschman: tingginya kepadatan di Jawa menciptakan tekanan pengangguran struktural dan penurunan produktivitas marginal tenaga kerja, sementara rendahnya kepadatan di luar Jawa mengakibatkan kelangkaan tenaga kerja yang justru dibutuhkan untuk menggerakkan sektor sumber daya alam yang potensial. (Malamassam, 2022) mendokumentasikan bahwa pola migrasi internal Indonesia secara konsisten memperparah ketidakseimbangan ini, karena individu muda dan terdidik cenderung berpindah ke wilayah padat yang sudah maju, memperkuat efek polarisasi Hirschman melalui saluran demografis yang seringkali terabaikan dalam analisis kebijakan. Garis tren kumulatif garis oren di grafik menunjukkan bahwa hanya beberapa provinsi saja yang memberi kontribusi besar

terhadap total kepadatan penduduk nasional. Pemerintah sudah berusaha meratakan pembangunan, seperti program transmigrasi, pembangunan yang merata di daerah timur Indonesia, serta penyampaian informasi tentang program keluarga berencana. Namun, grafik tersebut menunjukkan bahwa perbedaan kepadatan masih sangat besar dan terus berlangsung.

Ketiga variabel tersebut modal manusia, akumulasi kapital, dan tekanan demografi bekerja secara sinergis dalam membentuk dan mereproduksi ketimpangan yang tercermin pada fluktuasi Indeks Williamson Indeks yang konsisten bergerak antara 0,70 dan 0,80 selama delapan tahun menunjukkan bahwa berbagai kebijakan redistribusi yang telah diterapkan pemerintah, termasuk Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa senilai lebih dari Rp814 triliun pada tahun 2023 (Lewis & Lewis, 2023), belum mampu menggeser keseimbangan secara struktural. (Sinaga et al., 2023) menemukan bahwa dampak Dana Desa terhadap konvergensi antarwilayah masih terbatas karena lemahnya kapasitas absorpsi fiskal di daerah tertinggal sebuah kondisi yang secara teoritis disebut oleh Hirschman sebagai kegagalan *backward linkage*, yaitu ketidakmampuan wilayah pinggiran untuk memanfaatkan stimulus eksternal akibat tidak tersedianya fondasi produktif yang memadai (Bappenas, 2022). juga menegaskan bahwa program infrastruktur strategis nasional seperti Jalan Tol Trans-Sumatera dan proyek-proyek di kawasan timur Indonesia baru akan memberikan dampak konvergensi yang signifikan apabila dibarengi dengan penguatan modal manusia dan pembenahan iklim investasi secara simultan.

Berdasarkan keseluruhan gambaran empiris dalam keempat grafik di atas, sangat Jelas bahwa dinamika ketimpangan wilayah di Indonesia selama 2016–2023 bersifat multidimensional, persistent, dan tidak dapat direduksi hanya melalui

pendekatan pertumbuhan agregat. Gambar 1.1 membuktikan bahwa indeks ketimpangan tidak bergerak turun secara konsisten meskipun ekonomi nasional tumbuh. Gambar 1.2 menunjukkan bahwa akumulasi modal manusia sangat terkonsentrasi Gambar 1.3 mengungkapkan bahwa kapital domestik mengalir sangat tidak merata. dan Gambar 1.4 memperlihatkan bahwa tekanan demografi mendistorsi distribusi tenaga kerja secara spasial. Kombinasi keempat fakta empiris ini secara kuat mendukung tesis sentral (Husen et al., 2022). bahwa polarisasi pembangunan adalah kondisi yang inheren dalam tahap awal pertumbuhan ekonomi, dan hanya dapat dikoreksi melalui intervensi kebijakan yang terstruktur, berkelanjutan, dan menyentuh akar-akar struktural ketimpangan secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud mengkaji secara analitis bagaimana ketiga variabel modal manusia, akumulasi kapital domestik, dan tekanan demografi berinteraksi dalam membentuk dinamika ketimpangan wilayah di Indonesia tahun 2016–2023, dengan Teori Ketimpangan Regional Hirschman sebagai pisau analisis utamanya. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi perumusan kebijakan pembangunan wilayah yang lebih berkeadilan dan berbasis bukti empiris yang kuat.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pengujian dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Seperti penelitian yang telah dianalisis (Hartati et al., 2020). hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah antar provinsi di Indonesia, sedangkan investasi asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan, dan penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh signifikan. Hasil penelitian (Nurhayati, 2021) yang menunjukkan

variabel rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk di Indonesia, namun investasi berpengaruh negatif dan signifikan. Penelitian lain juga dilakukan oleh (Mustakim, 2025) menunjukkan bahwa PMDN dan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Sesuai dengan jurnal tersebut.

Pembangunan di seluruh wilayah tidak selalu terjadi secara merata. Hingga kini perbedaan pembangunan antar daerah masih menjadi salah satu isu yang sangat penting di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tercapai belum cukup untuk menyelesaikan masalah yang muncul karena pembangunan masih tidak merata. Ada beberapa daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi cepat, namun ada juga daerah lain yang pertumbuhannya lambat. Daerah tersebut tidak berkembang dengan sama pesat, hal ini karena adanya ketidakmerataan dan kurangnya sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya modal seperti investasi dari dalam negeri, sumber daya manusia yang diukur melalui tingkat pendidikan, serta kepadatan penduduk yang menjadi indikator tekanan demografi terhadap pembangunan wilayah. Penelitian tentang ketimpangan penting dilakukan karena ketimpangan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Berdasarkan data Indeks Williamson yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2023 masih masuk dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi, dengan nilai indeks yang hampir mencapai 0,7 hingga 0,8. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di berbagai daerah belum merata, karena daerah-daerah di Pulau Jawa lebih berkembang dibandingkan daerah di luar Jawa. Pendidikan yang tinggi merupakan bagian dari kualitas sumber daya

manusia dan memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan kerja tenaga kerja. Semakin tinggi pendidikan yang ada di suatu daerah, maka semakin baik kemampuan masyarakatnya untuk ikut serta dalam membangun perekonomian daerah tersebut.

Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam, di mana beberapa penelitian menunjukkan dampak negatif yang signifikan terhadap perbedaan, sedangkan penelitian lain tidak menemukan hasil yang signifikan. Investasi dari dalam negeri atau PMDN merupakan salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang tersebar merata diharapkan bisa membantu mengimbangi perkembangan pembangunan di berbagai daerah. Namun, kenyataannya distribusi PMDN di Indonesia masih terpusat di beberapa wilayah tertentu, terutama di Pulau Jawa, yang akhirnya bisa memperlebar perbedaan tingkat pembangunan antar daerah. Kepadatan penduduk menunjukkan tekanan terhadap sumber daya dan infrastruktur yang ada di sebuah area. Wilayah yang penduduknya banyak biasanya lebih menarik secara ekonomi, tetapi juga lebih sulit dalam menyediakan pekerjaan dan pelayanan publik yang memadai.

Perbedaan ketebalan jumlah penduduk di berbagai daerah bisa menjadi sebab terjadinya perbedaan dalam kemajuan pembangunan. Dalam hal ini, diperlukan penelitian yang mendalam mengenai perbedaan tingkat pembangunan di antara daerah-daerah agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis memilih topik dalam penelitian ini dengan judul *Dinamika Ketimpangan Wilayah di Indonesia: Perspektif*

Modal Manusia, Akumulasi Kapital Domestik, dan Tekanan Demografi Tahun 2016-2023.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh modal manusia yang diukur dengan rata-rata lama sekolah (RLS) terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia pada 34 provinsi tahun 2016–2023?
2. Bagaimana pengaruh akumulasi kapital domestik yang diukur dengan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia pada 34 provinsi tahun 2016–2023?
3. Bagaimana pengaruh tekanan demografi yang diukur dengan kepadatan penduduk terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia pada 34 provinsi tahun 2016–2023?
4. Bagaimana pengaruh modal manusia (RLS), akumulasi kapital domestik (PMDN), dan tekanan demografi (kepadatan penduduk) secara simultan terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia pada 34 provinsi tahun 2016–2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh modal manusia yang diukur dengan rata-rata lama sekolah (RLS) terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia pada 34 provinsi tahun 2016–2023.
2. Menganalisis pengaruh akumulasi kapital domestik yang diukur dengan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia pada 34 provinsi tahun 2016–2023.

3. Menganalisis pengaruh tekanan demografi yang diukur dengan kepadatan penduduk terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia pada 34 provinsi tahun 2016–2023.
4. Menganalisis pengaruh modal manusia (RLS), akumulasi kapital domestik (PMDN), dan tekanan demografi (kepadatan penduduk) secara simultan terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia pada 34 provinsi tahun 2016–2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis yaitu

1. Manfaat Teoritis

- a) Memperkuat dan memperluas aplikasi Teori Ketimpangan Regional Hirschman dalam konteks negara kepulauan berkembang, khususnya Indonesia pasca-desentralisasi fiskal, sehingga teori ini semakin teruji relevansinya pada konteks empiris yang lebih kontemporer.
- b) Memberikan bukti empiris terbaru (2016–2023) mengenai relevansi konsep *polarization effect* dan *trickling-down effect* Hirschman dalam menjelaskan persistensi ketimpangan antar provinsi di Indonesia, termasuk pada periode pandemi dan pemulihan pasca-pandemi.
- c) Menambah literatur ilmu ekonomi regional tentang interaksi simultan antara modal manusia, kapital domestik, dan demografi sebagai determinan ketimpangan spasial yang selama ini masih jarang dikaji secara terpadu dalam satu model analisis

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah Pusat (Bappenas & Kementerian Keuangan):
 - 1) Memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk merancang kebijakan redistribusi fiskal yang lebih efektif, terutama dalam menentukan prioritas

alokasi Dana Transfer ke Daerah yang mempertimbangkan ketiga variabel modal manusia, kapital, dan demografi secara simultan.

- 2) Menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas program Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Dana Desa dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah berdasarkan data panel terbaru 2016–2023.

b) Bagi Pemerintah Daerah:

- 1) Memberikan gambaran empiris tentang posisi relatif masing-masing provinsi dalam hal modal manusia, kapital, dan demografi sehingga dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan wilayah yang lebih terarah dan terukur.
- 2) Mendorong daerah tertinggal untuk memprioritaskan investasi pada pendidikan dan infrastruktur sebagai fondasi menarik kapital dan menyeimbangkan tekanan demografis yang tidak merata.

c) Bagi Investor dan Pelaku Usaha:

- 1) Memberikan peta spasial potensi dan risiko investasi berdasarkan kondisi modal manusia dan kepadatan penduduk antarprovinsi, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lokasi investasi yang lebih strategis.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa Batasan yang perlu diperhatikan :

1. Penelitian ini hanya mencakup 34 provinsi di Indonesia sebagai unit analisis dan tidak membahas ketimpangan pada tingkat kabupaten/kota karena keterbatasan konsistensi data selama periode yang sama.

2. Periode pengamatan dibatasi pada tahun 2016 hingga 2023 (8 tahun), mencakup fase pra-pandemi, pandemi Covid-19, dan pemulihan pasca-pandemi.
3. Variabel ketimpangan wilayah hanya diukur menggunakan Indeks Williamson berbasis PDRB per kapita, tidak mencakup dimensi ketimpangan non-ekonomi.
4. Modal manusia hanya diproksikan melalui Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), tidak mencakup indikator kualitas pendidikan lainnya seperti skor kompetensi atau angka putus sekolah.
5. Akumulasi kapital domestik hanya menggunakan realisasi PMDN sebagai proxy, tidak mencakup Penanaman Modal Asing (PMA) atau belanja modal pemerintah daerah.
6. Tekanan demografi hanya direpresentasikan oleh kepadatan penduduk, tidak mencakup struktur usia, angka fertilitas, atau tingkat urbanisasi.
7. Analisis interpretasi hasil menggunakan Teori Ketimpangan Regional Hirschman (1958) sebagai kerangka utama, sehingga dimensi kelembagaan dan modal sosial tidak dibahas secara mendalam.